

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah fase penting dalam usaha meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan suatu negara. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam konteks ini. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan rencana pembangunan demi kesejahteraan nasional. Terbatasnya sumber daya pemerintah untuk membiayai proyek pembangunan disebabkan oleh disparitas antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk mengatasi disparitas tersebut, Indonesia telah mengambil berbagai langkah, seperti memberikan insentif di dalam dan di luar negeri, memperluas dan memperkuat sumber daya fiskal dan non-keuangan, serta memperluas dan memperkuat aliran pendapatan pemerintah melalui badan usaha milik negara. Seiring berjalannya waktu, ULN muncul sebagai opsi kebijakan untuk mendorong atau mempercepat pertumbuhan ekonomi negara.

Menurut Pandangan Lincoln Arsyad (2010) dan Todaro (1998) menyoroti peran ULN sebagai instrumen vital dalam mendukung sumber pendanaan bagi anggaran nasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Arsyad menegaskan bahwa utang ini berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan pemerintah untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi, terutama kegiatan produktif yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, ULN bukan hanya dianggap sebagai beban finansial, tetapi juga sebagai investasi yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi negara. Definisi Todaro (1998) memperjelas bahwa ULN melibatkan berbagai bentuk pinjaman publik, baik berupa uang tunai maupun aset lainnya, yang diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang. Tujuan utama dari pemberian utang ini adalah untuk mewujudkan pembangunan dan distribusi pendapatan yang merata. Dengan kata lain, ULN diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan pendapatan di dalam negeri.

Pentingnya ULN sebagai instrumen pembangunan menjadi nyata ketika melihat bagaimana dana yang diperoleh dari utang tersebut dapat digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor kunci lainnya. Pengeluaran ini, pada gilirannya, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

produktivitas, dan membuka peluang investasi baru yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, meskipun ULN dapat memberikan manfaat signifikan, penting untuk diakui bahwa pengelolaannya harus dilakukan dengan bijak. Ketergantungan yang berlebihan pada ULN dapat menimbulkan risiko finansial dan memerlukan kebijakan yang cermat untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan secara efektif untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan..

Pandangan dari Batu Bara dan Saskara (2015) mengungkapkan realitas, sebagian besar negara berkembang mengandalkan ULN sebagai salah satu pendorong alternatif untuk memajukan pembangunan ekonominya. Adalah kenyataan yang diakui untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, negara berkembang membutuhkan sumber dana yang besar, dan pinjaman luar negeri sering dianggap sebagai solusi yang umum. Dalam konteks ini, mekanisme pinjaman luar negeri memainkan peran penting dalam menyediakan modal yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan yang berskala besar. Meskipun begitu, pandangan yang diungkapkan oleh Yudiantmaja (2012) menyoroti bahwa ada risiko perangkap utang yang dapat dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pinjaman luar negeri yang digunakan secara tidak terkontrol dan tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan negara terjatuh dalam perangkap utang yang sulit untuk diatasi. Fenomena ini menciptakan tantangan serius dalam manajemen keuangan dan pembangunan ekonomi, terutama ketika beban utang menjadi tidak proporsional dengan kemampuan negara untuk membayarnya.

Arus modal asing masuk mendominasi di banyak negara berkembang, melibatkan modal asing seperti pinjaman infrastruktur, penerimaan anggaran sektoral, dan arus keuangan terkait dengan pengeluaran pemerintah atau untuk mendanai pembangunan sektor publik nasional. ULN ini memiliki peran penting sebagai sumber dana dalam pembangunan ekonomi negara dan modal untuk membangun infrastruktur, termasuk Indonesia.

Sejarah ULN Indonesia dimulai ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Salah satu persyaratan KMB ialah melunasi utang Belanda akibat kerugian pada agresi militer Belanda di Indonesia selama agresi I dan II, yang kemudian menjadi awal dari ULN Indonesia.

Kemudian, tahun 1998, Indonesia mengalami krisis multidimensi, dan pemerintahan Soeharto menyetujui Letter of Intent (LOI) dengan Dana Moneter

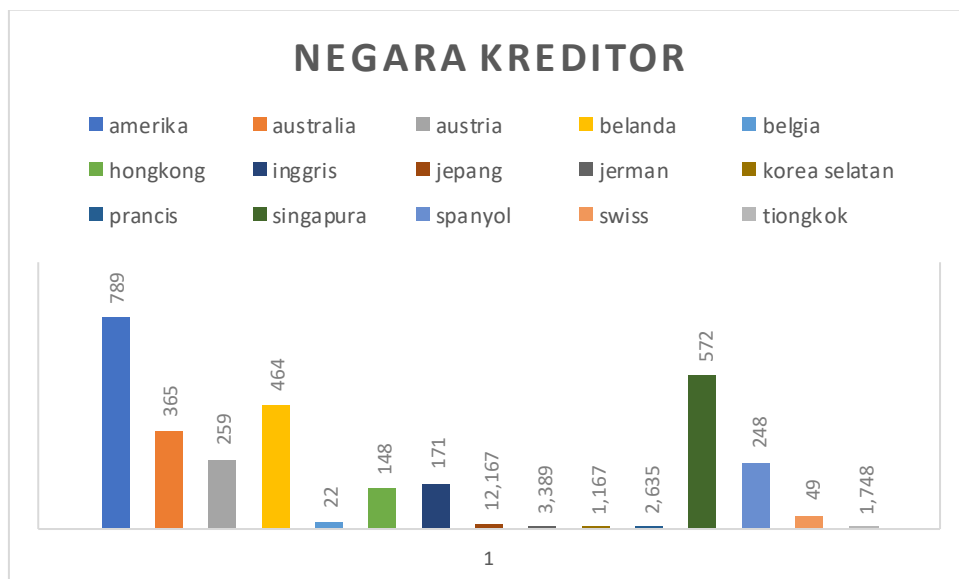
Internasional (IMF) untuk mendapatkan pinjaman guna menyelamatkan perekonomian. Krisis ekonomi tersebut signifikan meningkatkan ULN Indonesia, seiring dengan melemahnya nilai kurs rupiah terhadap dolar AS. Sri Mulyani (2021) menyatakan bahwa krisis mata uang tersebut merupakan krisis neraca pembayaran yang dipicu oleh perubahan dari nilai tukar tetap menjadi nilai tukar mengambang, mencakup dampak multidimensi seperti peningkatan kemiskinan, PHK massal, inflasi, dan konsekuensi sosial dan politik yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto.

Selanjutnya, krisis tahun 2008, yang dipicu oleh krisis Subprime Mortgage di Amerika, menyebabkan harga minyak global melonjak dan komoditas lainnya, yang meningkatnya beban fiskal Indonesia. Indonesia kemudian mengambil kebijakan ULN sebagai alternatif untuk menyeimbangkan beban fiskal pada saat itu. Kemudian, pada tahun 2020, terjadi krisis akibat pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian dunia mengalami stagnasi di semua sektor. Pandemi ini membuat laju perekonomian Indonesia berhenti total karena pembatasan aktivitas guna menghentikan penyebaran virus. Akibatnya, ULN pemerintah Indonesia meningkat, tercatat pada Agustus 2020 sebesar 413,4 miliar dolar AS, dengan peningkatan sebesar 5,7% (YoY). Alokasi ULN pemerintah mencakup sektor jasa (23,7%), sektor konstruksi (16,5%), jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6%) (SULNI, 2020). Pada tahun 1970, ULN (ULN) Indonesia mencapai \$3,43 miliar. Pada tahun 1998, akibat krisis mata uang, ULN melonjak drastis menjadi \$151,48 miliar. Tahun 2021, ULN Indonesia mencapai \$415,1 miliar, setara dengan 35% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tabel 1.1



Gambar 1.1. ULN Indonesia 1970 – 2021

Tabel 1.1 Peningkatan terus-menerus ULN (ULN) Indonesia terungkap sebagai suatu kerugian yang jelas bagi negara. Teresa Hayter dan Cheryl Pyer, dalam karya klasiknya, mengaitkan ULN dengan masalah politik antarnegara, melihatnya sebagai bentuk imperialisme terhadap tuntutan negara berkembang yang mereka samakan dengan doktrin. Menurut Hernatasa (2004), paradoks Fisher muncul dalam mekanisme ULN, di mana semakin banyak pembayaran cicilan ULN, semakin besar akumulasi ULN, sesuai dengan skema cicilan dan bunga ULN. Lebih spesifik, Hernatasa menekankan bahwa tidak semua ULN diterbitkan untuk mempercepat pertumbuhan, dan sebagian digunakan untuk menutupi pembayaran pokok atau bunga ULN. Selain itu, ia mencatat fluktuasi nilai tukar sebagai faktor khusus yang mempengaruhi pembayaran bunga utang, menghasilkan dampak yang signifikan dalam konteks ini.



Gambar 1.2. ULN Indonesia menurut negara kreditor tahun 2020

Pada gambar di atas menggambarkan total ULN Indonesia menurut kreditor pada tahun 2020. Terdapat 15 negara yang berperan sebagai kreditor ULN Indonesia, termasuk Amerika Serikat, Hongkong, Prancis, Australia, Inggris, Singapura, Austria, Jerman, Swiss, Belgia, Korea Selatan, dan Tiongkok. Amerika Serikat menduduki posisi pertama sebagai kreditor, sementara Singapura menjadi negara kedua yang memberikan ULN kepada Indonesia. Komposisi ULN mencakup utang pemerintah, bank sentral, dan utang swasta. Tidak dapat dipungkiri bahwa ULN merupakan alternatif pendanaan bagi negara dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, dengan Suku Bunga, PDB, Kurs dan Ekspor sebagai indikator utama pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi, terjadi peningkatan yang signifikan dalam

pendapatan pemerintah, yang kemudian digunakan untuk membayar cicilan atau bunga utang pemerintah. Status ULN Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintahan di masa lalu.

Selain dampaknya yang signifikan pada aspek-aspek internal perekonomian, suku bunga juga memiliki hubungan erat dengan masalah ULN suatu negara. Keterkaitan mencuat melalui mekanisme pengaruh suku bunga terhadap arus modal internasional. Saat suku bunga domestik naik, investor cenderung tertarik untuk menanamkan modalnya di negara tersebut karena imbal hasil yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, daya tarik investasi luar negeri bisa meningkat karena peluang imbal hasil yang lebih menguntungkan. Edward dan Khan (1985), nilai suku bunga dipengaruhi oleh dua kategori faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup elemen-elemen seperti pendapatan nasional, jumlah uang beredar (JUB), dan estimasi inflasi. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan suku bunga di luar negeri dan proyeksi tingkat perubahan nilai tukar valuta asing.

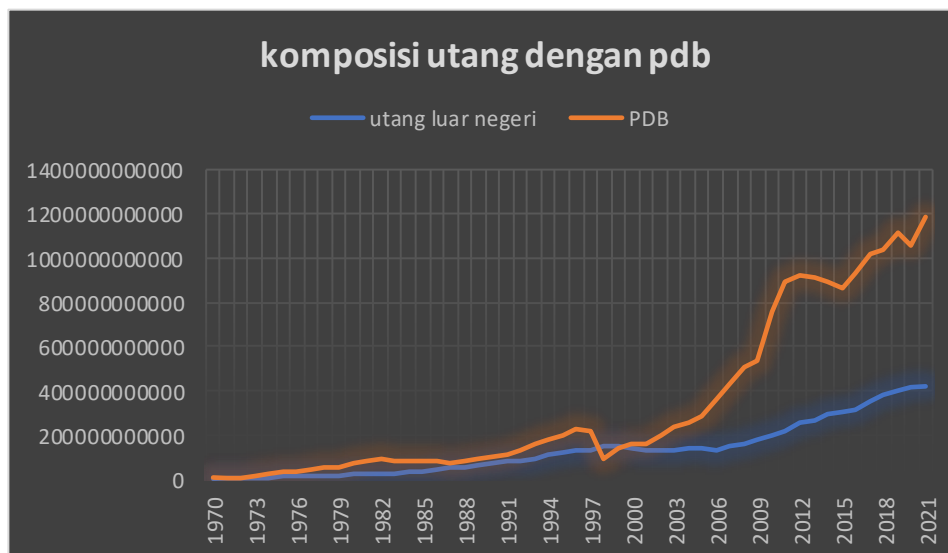
Dalam konteks ini, tingkat suku bunga dapat mendorong pemerintah suatu negara untuk mencari ULN dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Namun, sisi lain persamaan ini adalah bahwa ketika negara memiliki ULN yang signifikan, perubahan dalam tingkat suku bunga global dapat berdampak langsung pada beban utang tersebut. Kenaikan suku bunga global bisa meningkatkan biaya pembayaran bunga utang, sementara suku bunga yang lebih rendah dapat memberikan keringanan. Dengan demikian, dinamika suku bunga tidak hanya mempengaruhi perekonomian secara internal, tetapi juga berperan dalam membentuk posisi keuangan suatu negara di pasar global. Pemahaman mendalam terhadap interaksi antara suku bunga, ULN, dan arus modal internasional menjadi sangat penting bagi pemerintah dan pelaku pasar guna merancang kebijakan ekonomi yang optimal dan mengelola risiko finansial yang kompleks.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi yang tidak memuaskan atau kebijakan pemerintahan sebelumnya menjadi pendorong di balik permasalahan ULN saat ini. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ULN untuk menutup defisit negara dapat menciptakan depondensi yang berimplikasi pada kemandirian negara. Soal pengukuran kesejahteraan sudah lama bercokol dalam pemikiran ekonomi modern. 1600, ahli ekonomi-politik Inggris William Petty melakukan survey pertama mengenai

kesejahteraan nasional dengan menganalisis secara sistematis nilai tanah taklukan Oliver Cromwell di Irlandia. Kemudian lahir Produk Domestik Bruto 1934 ekonom Simon Kuznets yang memelopori PDB sebagai dasar acuan matematik dalam menghitung tingkat kesejahteraan sebuah negara. PDB dirancang untuk merefleksikan jumlah produksi dalam suatu periode waktu tertentu, tanpa memperhatikan apakah produksi tersebut digunakan untuk konsumsi jangka pendek, investasi dalam aset tetap baru, peningkatan inventaris, atau penggantian aset tetap yang telah terdepresiasi.

PDB merupakan ukuran matematis perekonomian yang dijadikan acuan sebagai ukuran untuk mengukur kesejahteraan suatu negara dan masyarakatnya. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa PDB mengukur dua aspek secara simultan, yaitu total pendapatan dan total belanja atau pengeluaran secara keseluruhan (Mankiw, 2000).

Gambar 1. 3. Komposisi ULN dengan PDB



Komposisi ULN Indonesia dengan PDB Indonesia bisa kita lihat pada gambar 1.3. meninjau dan melihat data ini bahwa ketika pemerintahan era pra reformasi terjadi stagnasi peningkatan PDB terhadap ULN hal ini diakibatkan ketika era pemerintahan Soeharto mengemban tugas memperbaiki keuangan Indonesia yang kala itu terjadi *hyperinflasion* dan pembangunan infrastruktur yang sangat masif di zamannya yang kemudian di gelari sebagai bapak pembangunan negara. Setelah reformasi 1999 data menunjukkan penurunan PDB dan peningkatan ULN akibat dari gejolak sosio-politik pada saat itu. Setelahnya data menunjukkan bahwa setelah reformasi perlahan terjadi peningkatan PDB yang cukup signifikan terhadap ULN, hal ini senada Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa ULN dianggap memiliki kontribusi positif terhadap

pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan tabungan masyarakat sebagai hasil atau dampak lanjutannya. Ini menciptakan efek pengganda (multiplier effects) yang positif pada perekonomian.

Selanjutnya Kurs menjadi variabel makroekonomi yang mempengaruhi ULN, kurs mata uang asing mencerminkan nilai atau kekuatan mata uang suatu negara yang diukur dalam nilai mata uang negara lain. Dapat diartikan sebagai jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Indonesia memakai sistem pasar bebas dengan mekanisme kurs mengambang yang sangat rentan dengan sosio politik global. Fluktuasi kurs akan mengakibatkan mata uang domestic akan tertekan yang menimbulkan jumlah pinjaman luar negeri akan meningkat. Beberapa potret sejarah menjelaskan betapa rapuhnya sistem mata uang kita ketika dibenturkan dengan arus global. Hal ini terbukti pada krisis moneter 1998, krisis 2007.

Perdagangan internasional, khususnya kegiatan ekspor, bukan hanya menjadi aspek penting dalam dinamika perekonomian suatu negara tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pinjaman luar negeri. Ekspor, sebagai elemen vital dalam perdagangan internasional, mengacu pada aktivitas jual-beli barang dan jasa antar negara atau kelompok negara yang dapat menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi nasional. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Batu Bara dan Saskara (2015), yang mengungkapkan bahwa tingginya tingkat pinjaman luar negeri seringkali dikaitkan dengan defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan, sebagai hasil dari ekspor yang bernilai lebih rendah daripada impor, menciptakan keadaan di mana negara tersebut harus meminjam dana dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam konteks ini, nilai ekspor yang rendah dihubungkan dengan ketergantungan pada pinjaman luar negeri dalam jangka panjang. Fenomena ini menandakan bahwa kemampuan suatu negara untuk membayar utangnya dapat dipengaruhi oleh performa perdagangan internasionalnya.

Sebaliknya, apabila ekspor mengalami pertumbuhan dan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan impor, neraca perdagangan menjadi positif. Hal ini berarti bahwa negara tersebut mampu menghasilkan lebih banyak pendapatan dari ekspor daripada pengeluaran untuk impor. Dalam perspektif ULN, neraca perdagangan yang positif memberikan dampak positif dengan meningkatkan devisa negara. Devisa yang diperoleh dari ekspor dapat digunakan untuk membayar ULN, mengurangi

ketergantungan pada pinjaman luar negeri, dan meningkatkan stabilitas finansial nasional. Dengan demikian, hubungan erat antara ekspor, neraca perdagangan, dan pinjaman luar negeri menandai kompleksitas dinamika ekonomi global. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan efektif, memungkinkan negara untuk mengoptimalkan manfaat dari perdagangan internasional sambil mengelola tingkat ULN dengan bijak.

Studi ini secara empiris melakukan uji hubungan antara ULN (ULN) dengan Produk Domestik Bruto (PDB), ULN dengan nilai tukar, dan ULN dengan ekspor. Periode penelitian yang digunakan melibatkan rentang waktu tahun 1970 hingga 2021, dengan metode analisis yang diterapkan adalah Analisis VAR Merujuk pada penjelasan tersebut, judul penelitian ini dirumuskan sebagai "**Analisis Determinan ULN di Indonesia (1970–2021).**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *shock* nilai Suku Bunga berpengaruh kepada ULN Indonesia ?
2. Apakah *shock* nilai PDB berpengaruh terhadap ULN Indonesia ?
3. Apakah *shock* nilai Kurs berpengaruh terhadap ULN Indonesia ?
4. Apakah *shock* nilai Ekspor berpengaruh terhadap ULN Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis pengaruh Suku Bunga terhadap ULN Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh PDB terhadap ULN Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Kurs terhadap ULN Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh Ekspor terhadap ULN Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang agar memberikan manfaat baik bagi praktisi maupun teoretis:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan kepada ilmu pengetahuan dengan menambah pengetahuan dan literatur terkait masalah ULN (ULN) di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong penelitian lanjutan dan pengembangan dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktisi:

a. Peneliti :

Hasil penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian mengenai ULN, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut, dan memperkaya pemahaman di bidang ini.

b. Masyarakat:

Penelitian ini diarahkan untuk membantu masyarakat memahami aspek-aspek ULN di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu ekonomi yang terkait.

c. Pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuatan kebijakan ULN oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dirumuskan akan lebih terarah dan mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

E. Batasan masalah

Dengan merinci fokus penelitian ini, tujuan kami adalah memastikan agar penulisan tetap sesuai dengan tujuan awal. Pembatasan yang diterapkan oleh penulis mencakup:

a. Keterkaitan antara variabel independen, meliputi Suku Bunga, PDB, Kurs, dan Ekspor, dengan variabel dependen ULN.

b. Penggunaan data penelitian ini dikumpulkan dari BI, BPS, KEMENKEU, Bank Dunia, dan mencakup periode 30 tahun sebelumnya, yaitu kuartal 1970 hingga 2021 (Q1 hingga Q4).